

ANALISIS DAYA SAING DAERAH DI INDONESIA

Ridwan^a

Basri Hasanuddin^b

Muhammad Amri^b

Madris^b

rdw21566@gmail.com

^aFakultas Ekonomi Universitas Janabadra, Yogyakarta

^bFakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin, Makassar

Abstract

This study aims to illustrate the map of provincial competitiveness in Indonesia, further to determine the influence of determinants of provincial competitiveness in Indonesia. The standardized score method is used to measure the competitiveness of 33 provinces in Indonesia. Furthermore, multiple regression analysis is used to determine the driving factors affecting regional competitiveness. The study findings show that health and education aspects which reflect the quality of human resources have a significant effect on regional competitiveness. Similarly, infrastructure and investment have a positive and significant impact on the high competitiveness of provinces in Indonesia. While the institutional factor that is represented by the democratic condition in Indonesia does not contribute to regional competitiveness. Overall, the score of provincial competitiveness in Indonesia indicates that provinces with high competitiveness are dominated by provinces with economic base that are sourced from natural resource wealth and/or areas that have economic activities based on industry and service sectors. While provinces with low real competitive position are generally regions with economic base that rely on primary sector (especially agriculture).

Keywords: *regional competitiveness, standardized score, resources based., manufacturing industry, knowledge based economy*

PENDAHULUAN

Gagasan daya saing daerah menjadi wilayah perdebatan konseptual selama beberapa tahun terakhir ini. Beberapa pakar beralasan bahwa konsep daya saing lebih tepat digunakan untuk perusahaan dan bukan “daerah atau negara.” Namun, belakangan ini beberapa penelitian berbasis ilmiah dan praktis telah berkembang dengan tujuan menemukan landasan konseptual dan bukti empiris guna mengukur dan menemukannya faktor pendorong daya saing daerah (seperti:

Huggins *et al.*, 2014; Lengyel *et al.*, 2013; Annoniet *et al.*, 2017).

Sementara itu, menganalogikan antara perusahaan dan negara telah banyak dikritik karena negara tidak bisa keluar dari bisnis dan karena persaingan antar-negara dapat memberikan keuntungan bagi keduanya, sebaliknya persaingan antar-perusahaan di sektor yang sama lebih mungkin untuk menjadi *zero-sum game* (Krugman, 1996). Lebih jauh, Bristow (2005) menyatakan bahwa *zero-sum*

konseptualisasi daya saing daerah sering memunculkan premis bahwa daya saing akan memunculkan anggapan adanya pemenang dan pihak yang kalah. Sementara Kitson *et al.* (2004) menyebut konsep daya saing tidak lebih sebuah konsep yang ‘misterius’.

Setelah studi awal Porter (1990) yang menghubungkan daya saing nasional dengan produktivitas, perhatian telah beralih ke daya saing di tingkat regional (daerah). Dari perspektif ini, kontribusi terbesar Porter adalah pandangannya terhadap daya saing di tingkat mikro (perusahaan) yang dapat diterapkan pada satuan wilayah, baik itu kabupaten/kota, provinsi ataupun negara. Menurut Porter, keunggulan kompetitif perusahaan dan daya tarik lingkungan regional untuk bisnis, serta kapasitas dan tingkat di mana sumber daya manusia (SDM) dimanfaatkan merupakan faktor penting pembentuk daya saing daerah. Oleh karena itu, tingkat daya saing dapat bervariasi di antara masing-masing daerah dalam satu

ruang geografis, tergantung pada faktor penggerak pertumbuhan (Audretsch dan Keilbach, 2004).

Selanjutnya, terkait dengan posisi daya saing Indonesia, *World Economic Forum* (WEF, 2016) pada publikasi *Global Competitiveness Report 2016-2017* melaporkan bahwa daya saing Indonesia kembali melemah. Posisi daya saing Indonesia berada pada peringkat ke-41 dari 138 negara yang disurvei. WEF mencatat posisi Indonesia turun empat tingkat dibandingkan hasil pemeringkatan tahun sebelumnya dan posisi ini terus mengalami penurunan sejak 2014. Dibandingkan dengan negara-negara Asia lainnya, daya saing Indonesia berada di bawah Singapura (urutan ke-2), Jepang (ke-8), Hong Kong (ke-9), Malaysia (ke-25), Korea Selatan (ke-26) dan Thailand (ke-34).

Bila dicermati lebih lanjut, merosotnya peringkat daya saing Indonesia dari tahun-tahun sebelumnya terutama terkait dengan mutu pelayanan

kesehatan dan pendidikan yang masih tergolong rendah, efisiensi pasar tenaga kerja rendah akibat kebijakan perburuhan, dan rendahnya pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. Sementara permasalahan mendasar yang mendapat sorotan dari WEF adalah korupsi, inefisiensi birokrasi pemerintah dan keterbatasan infrastruktur. Oleh karena itu, melemahnya daya saing Indonesia di tingkat global harus diantisipasi secara sistematis dan kritis. Menurunnya daya saing akan berdampak secara langsung maupun tidak langsung pada berbagai aspek kehidupan masyarakat Indonesia, khususnya aspek ekonomi. Seperangkat sistemik kebangsaan harus dipersiapkan dalam rangka meningkatkan daya saing.

Sementara itu, studi *Asia Competitiveness Institute* (ACI) tahun 2014 atas daya saing Daerah yang meliputi 33 Provinsi di Indonesia menunjukkan bahwa daya saing 21 dari 33 Provinsi di Indonesia berada di bawah rata-rata nasional (Tan *et al.*, 2016). Provinsi

dengan kinerja terbaik masih didominasi Provinsi di Pulau Jawa, lima dari enam Provinsi berada di kelompok 10 teratas. Sementara Provinsi di Kawasan Timur Indonesia menempati posisi 10 terbawah. Dari hasil studi ACI tersebut dapat ditarik kesimpulan, antara lain: 1) Provinsi-provinsi di Jawa sangatlah kompetitif; 2) Provinsi-provinsi di Kalimantan cukup kompetitif; 3) Provinsi-provinsi di Sumatera dan Sulawesi menunjukkan daya saing yang berbeda; dan 4) Provinsi-provinsi di Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua cenderung kurang kompetitif. Penting untuk dicatat, terutama bagi pemangku kebijakan, bahwa dengan Indonesia sebagai negara kepulauan, jarak dan konektivitas menjadi sangat penting dalam hal daya saing. Demikian juga, beberapa infrastruktur lunak, seperti teknologi informasi dan komunikasi, juga tak kalah penting.

Fakta tersebut di atas menunjukkan betapa pentingnya kemampuan Daerah dalam meningkatkan daya saingnya.

Kemampuan Daerah untuk meningkatkan daya saingnya akan sangat tergantung pada kemampuan Daerah dalam menemukenali dan menentukan faktor-faktor pendorong daya saing dan juga kemampuan Daerah dalam menetapkan kebijakan ekonomi yang difokuskan untuk dapat mendorong transformasi dan akselerasi pertumbuhan ekonomi regional. Lebih lanjut, transformasi dan akselerasi pembangunan haruslah bertumpu pada peningkatan kapasitas SDM, peningkatan produktivitas, penguatan kapasitas IPTEK, penyediaan infrastruktur yang terpadu dan merata, serta penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik dengan tujuan akhir meningkatkan daya saing daerah yang pada gilirannya daya saing nasional (bangsa) juga turut meningkat.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep daya saing daerah berkembang dari konsep daya saing yang digunakan untuk perusahaan dan negara. Pemikiran Porter (1990) banyak mewarnai pengembangan dan aplikasi konsep daya

saing di tingkat perusahaan. Selanjutnya konsep tersebut dikembangkan untuk tingkat negara sebagai daya saing global, khususnya melalui lembaga WEF yang menerbitkan laporan *Global Competitiveness Report*. Indeks daya saing global ini telah menjadi ukuran dan referensi dari kinerja ekonomi dan iklim investasi suatu negara.

Selanjutnya, ada tiga isu utama yang muncul terkait dengan konsep daya saing daerah. Pertama, bagaimana mendefinisikan daya saing daerah dan faktor-faktor yang memengaruhinya; Kedua, apa indikator yang harus digunakan untuk mengukurnya; Ketiga, bagaimana daya saing daerah diperbaiki atau ditingkatkan. Ketiga pertanyaan tersebut biasanya menjadi perdebatan yang tak berujung karena perbedaan latar belakang kepakaran masing-masing pihak, yakni ahli ekonomi berkonsentrasi pada isu yang pertama, peneliti ekonomi regional fokus pada pertanyaan yang kedua, sementara para ahli kebijakan Daerah dan pengambil

keputusan cenderung fokus pada isu yang ketiga.

Porter (2007) menyarankan menggunakan indikator pendapatan per kapita didekomposisi menjadi dua faktor yaitu produktivitas tenaga kerja dan tingkat kesempatan kerja sebagai ukuran daya saing. Pendapat yang hampir sama dikemukakan oleh Krugman (1994) bahwa daya saing merupakan cara lain untuk mengatakan produktivitas: *“Productivity isn’t everything, but in the long run it is almost everything. A country’s ability to improve its standard of living over time depends almost entirely on its ability to raise its output per worker.”*

Sementara Kitson *et al* (2004) menggunakan tiga indikator untuk mengukur daya saing daerah yaitu produktivitas Daerah, tingkat kesempatan kerja; dan standar hidup. Menurut Kitson, dasar dari keunggulan kompetitif adalah modal produktif, modal manusia, modal sosial-kelembagaan, modal budaya, modal infrastruktur, dan pengetahuan/modal

kreatif. Pandangan Kitson sejalan dengan hasil studi Lengyel (2013) atas 93 Provinsi dinegara Eropa Tengah yang menunjukkan modal manusia, modal sosial-kelembagaan dan infrastruktur merupakan faktor yang berpengaruh positif terhadap daya saing daerah. Dalam studi ini daya saing diproksi dengan PDRB per kapita, produktivitas tenaga kerja, dan tingkat kesempatan kerja.

Berbeda dengan konsep daya saing sebelumnya, Bristow (2005) mengemukakan dari sudut pandang ekonomi makro, dengan tetap mempertimbangkan aspek ekonomi mikro (tingkat perusahaan) dan *output* suatu Daerah (kemakmuran). Pandangan ini menegaskan bahwa daya saing daerah dan kemakmuran regional sebenarnya adalah pengertian yang saling tergantung. Menurut Bristow, suatu Daerah adalah kompetitif ketika Daerah tersebut memiliki kondisi dapat meningkatkan standar hidup masyarakatnya, atau memiliki kemampuan mempertahankan hasil (*outcome*) yang

telah dicapai.

Dengan demikian, antara level makro dan mikro dapat ditemukan konsep daya saing daerah dimana sebuah wilayah dalam konteks negara bukan merupakan agregasi perusahaan (Gardiner *et al.* 2004). Selanjutnya, Meyer-Stamer (2008) menyatakan bahwa secara sistemik daya saing suatu Daerah adalah kemampuan sebuah Daerah untuk menghasilkan pendapatan yang tinggi dan meningkatkan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di Daerah tersebut. Berbeda dengan definisi-definisi sebelumnya yang fokus pada konsep produktivitas, pandangan Meyer didasarkan sepenuhnya pada manfaat yang diperoleh oleh masyarakat yang tinggal di suatu Daerah. Hal ini mengindikasikan bahwa adanya hubungan yang erat antara daya saing dan kesejahteraan. Hal tersebut berarti bahwa Daerah yang kompetitif tidak hanya terkait dengan *output* yang dihasilkan seperti halnya produktivitas, melainkan berhubungan juga dengan tingkat

kesejahteraan masyarakat yang berkelanjutan (Bristow, 2005).

Lebih jauh, Delgado *et al.* (2012) mendefinisikan daya saing sebagai tingkat *output* yang diharapkan per penduduk usia kerja dengan didukung oleh keseluruhan potensi sumber daya yang dimiliki suatu bangsa. Menurut Delgado, faktor-faktor yang menjadi pendorong daya saing adalah: infrastruktur sosial (kesehatan dan pendidikan) dan institusi politik (kualitas institusi politik dan aturan hukum); kebijakan moneter dan fiskal; dan lingkungan ekonomi mikro. Selain itu, daya tarik investasi juga memengaruhi daya saing suatu negara.

Sementara itu, dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor No. 54 Tahun 2010 disebutkan bahwa Daya Saing Daerah adalah kemampuan perekonomian daerah dalam mencapai pertumbuhan tingkat kesejahteraan yang tinggi dan berkelanjutan, dengan tetap terbuka pada persaingan dengan Provinsi lainnya,

domestik, atau Internasional. Adapun indikator Daya Saing Daerah terdiri dari kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim berinvestasi, dan sumber daya manusia.

Dengan demikian, secara implisit dapat dianggap bahwa Daya Saing Daerah haruslah berasal dari kegiatan “*bottom-up*” dengan berfokus pada peningkatan sistem lokal. Perspektif ini menyerupai pandangan teori pembangunan endogen, dimana tempat atau wilayah bertindak sebagai suatu bentuk organisasi yang mengkoordinir dan memfasilitasi keunggulan kompetitif atau daya saing yang berkelanjutan (Courlet dan Soulage, 1995; Garofoli, 2002; Lawson & Lorenz, 1999; Maillat, 1998). Camagni (2002) lebih lanjut mengemukakan bahwa konsep Daya Saing Daerah dapat diterima secara teoritis, karena peran wilayah (daerah) dalam menyediakan lingkungan yang kompetitif untuk perusahaan dan proses akumulasi pengetahuan. Oleh karena itu, daerah semakin dianggap memiliki

peranan penting dalam pembangunan ekonomi di era ekonomi global saat ini. Fokus pada daerah mencerminkan konsensus yang berkembang bahwa daerah adalah unit spasial utama yang bersaing untuk menarik investasi, dan pada tingkat daerah pula pengetahuan disebarkan dan ditransfer, sehingga terbentuk aglomerasi perusahaan-perusahaan sektor industri maupun jasa di daerah tersebut.

Bila dicermati, beberapa pandangan terkait isu Daya Saing Daerah, terlihat bahwa pada dasarnya Daya Saing Daerah dihasilkan oleh interaksi yang kompleks antara faktor *input*, *output*, dan *outcome* yang ada di masing-masing daerah (Kitson *et al.*, 2004, Bristow, 2005, Delgado *et al.*, 2012, Hugginset *et al.*, 2013, Lengyel, 2013, Dijkstra *et al.*, 2011). Oleh karena itu, keberhasilan suatu daerah dibandingkan daerah-daerah lainnya akan sangat ditentukan oleh bagaimana keterkaitan antara ketiga hal tersebut. Di samping itu, daya saing daerah terkait juga dengan faktor-faktor non-ekonomi, seperti

parameter kondisi politik, sosial dan budaya masyarakat. Konsep daya saing yang merupakan interaksi dari komponen *input*, *output*, dan *outcome*, misalnya telah digunakan oleh Huggins dalam menghitung Indeks Daya Saing Daerah di Inggris (Huggins, 2003).

Dari konsep dan definisi mengenai Daya Saing Daerah di atas, terdapat kesamaan esensi yang cukup jelas antara Daya Saing Daerah dan Daya Saing Nasional. Kesamaan pandangan tersebut adalah bahwa tujuan akhir dari upaya untuk meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian adalah untuk meningkatkan tingkat kesejahteraan (*welfare/standard of living*) dari masyarakat yang berada di dalam perekonomian tersebut.

Berdasarkan uraian di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kesamaan esensi yang cukup jelas bahwa tujuan akhir dari upaya untuk meningkatkan daya saing dari suatu perekonomian adalah untuk meningkatkan kesejahteraan (*welfare/standard of living*)

penduduk yang berada di dalam perekonomian tersebut. Sebaliknya, walaupun belum ada konsensus yang secara tegas mendefinisikan daya saing, namun hampir semua pakar memiliki kesamaan pandangan mengenai apa saja yang harus dilakukan dalam rangka meningkatkan daya saing. Oleh karena itu, masih terdapat banyak kemungkinan bagi para pakar dan peneliti untuk mengeksplorasi hal-hal apa saja yang menjadi faktor penentu daya saing suatu Negara atau Daerah.

METODOLOGI

Keseluruhan data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder dengan mengambil kondisi sosial ekonomi Daerah dari 33 Provinsi di Indonesia selama kurun waktu 2010 hingga 2016, yaitu tahun terakhir dengan kelengkapan dan ketersediaan data yang ada. Sumber utama data sekunder penelitian ini berasal dari Badan Pusat Statistik.

1. Pengukuran Daya Saing Provinsi

Hasil utama dari analisis daya saing Provinsi di Indonesia adalah peringkat daya saing antar Provinsi dan analisis faktor-faktor yang mempengaruhi daya saing Provinsi di Indonesia. Terdapat dua formula utama yang diperlukan untuk membuat peringkat serta analisis faktor yang mempengaruhi daya saing tersebut, yaitu indikator-indikator yang mampu menunjukkan dan mengindikasikan tingkat kompetitif Daya Saing Daerah serta skoring yang dapat mentransformasikan variabel-variabel atau indikator-indikator daya saing menjadi pemeringkatan Daya Saing Daerah. Penentuan dan penyeleksian variabel-variabel daya saing dilakukan melalui penelusuran literatur dan hasil temuan penelitian sebelumnya.

Untuk melakukan skoring dipergunakan empat indikator yang merupakan variabel *output* Daya Saing Daerah, yaitu produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita, tingkat kesempatan kerja dan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita. Selanjutnya, keseluruhan data

keempat variabel *output* tersebut ditransformasikan sedemikian rupa sehingga menjadi “*comparable*”.

Dalam penelitian ini digunakan metode *standardized score* yang merupakan perbandingan relatif untuk melihat seberapa bagus kinerja suatu Provinsi tertentu dibandingkan dengan rata-rata Provinsi secara keseluruhan. Oleh karena itu, unit pengukuran sudah tidak relevan lagi. *Standardized score* tidak memiliki satuan pengukuran karena hanya mengukur kinerja relatif diantara Provinsi-Provinsi, apapun indikatornya. Secara statistik, ini mengukur berapa besar *standard deviations* dari setiap Provinsi dari rata-rata seluruh Provinsi. Dengan demikian, standarisasi data bertujuan untuk menyamakan unit pengukuran dari setiap variabel, sehingga meskipun pada mulanya variabel-variabel mempunyai unit pengukuran yang berbeda, transformasi yang dilakukan menjadikan seluruh variabel menjadi *comparable*. Jika sebuah Provinsi memiliki *standardized score* nol,

berarti indikator daya saing Provinsi tersebut berada pada rata-rata dari keseluruhan provinsi. Adapun jika memiliki skor negatif berarti Provinsi tersebut berada di bawah rata-rata. Sebaliknya, jika memiliki nilai positif, berarti kinerja daya saing Provinsi tersebut berada di atas rata-rata nasional. Semakin jauh skornya dari nol, maka semakin jauh kinerja daya saing Provinsi dari rata-rata nasional. Jika sebuah Provinsi memiliki skor positif tinggi, artinya Provinsi ini tampil di atas rata-rata nasional.

Selanjutnya, menghitung jumlah keseluruhan nilai skor daya saing Provinsi dari empat indikator untuk menentukan peringkat daya saing 33 Provinsi di Indonesia. Adapun formula yang digunakan adalah:

$$\text{Skor Daya Saing Provinsi} = 25\%(SVI_{ij}) + 25\%(SVI_{ij}) + 25\%(SVI_{ij}) + 25\%(SVI_{ij})$$

dimana:

SVI_{ij} adalah *standardized value* indikator j untuk provinsi i .

Hasil perhitungan keseluruhan skor daya saing Provinsi digunakan untuk

membandingkan capaian daya saing masing-masing daerah Provinsi di Indonesia, di samping itu skor daya saing ini juga dipergunakan sebagai variabel dependen dalam model empirik penelitian ini.

2. Model Empirik

Model yang digunakan untuk menganalisis faktor-faktor yang memengaruhi daya saing Daerah di Indonesia adalah Analisis Ekonometrika. Faktor kesehatan, pendidikan, infrastruktur, kelembagaan dan investasi dalam penelitian ini merupakan variabel input terhadap daya saing daerah. Sehingga model ekonometrika yang digunakan adalah regresi berganda dalam bentuk persamaan sebagai berikut:

$$RC_{it} = \alpha_0 + \alpha_1 HEALTH_{it} + \alpha_2 EDU_{it} + \alpha_3 \ln INFRA_{it} + \alpha_4 INST + \alpha_5 \ln INVEST_{it} + e_{it}$$

dimana :

RC_{it} : Skor daya saing provinsi i tahun ke- t diukur dengan *standardized score* berdasarkan indikator produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita, tingkat kesempatan kerja dan pengeluaran konsumsi per kapita.

- HEALTH_{it} : Mutu SDM bidang **kesehatan** provinsi *i* tahun ke-*t* diproksi dengan Angka Harapan Hidup yaitu perkiraan lama hidup rata-rata penduduk diukur dalam tahun.
- EDU_{it} : Persentase jumlah tenaga kerja yang telah **menamatkan pendidikan** formal SMA/SMK hingga Pendidikan Tinggi provinsi *i* tahun ke-*t*, diukur dalam persen.
- INFRA_{it} : Ketersediaan **infrastruktur** provinsi *i* tahun ke-*t* diproksi dengan ketersediaan energi listrik di masing-masing provinsi yang diukur dengan rata-rata konsumsi listrik per kapita, dinyatakan dalam kWh.
- INST_{it} : Kelembagaan yang menggambarkan kondisi **demokrasi** provinsi *i* tahun ke-*t* didekati dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) diukur dengan skala 0-100.
- INVEST_{it} : Jumlah realisasi **investasi** provinsi *i* tahun ke-*t* baik yang berasal dari Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing/PMA, diukur dalam rupiah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil perhitungan skor daya saing akan memberikan potret profil Daya Saing Provinsi di Indonesia secara keseluruhan. Hasil ini menunjukkan posisi relatif suatu Provinsi terhadap Provinsi lain dengan memperhatikan semua faktor-faktor

pendukung yang dimilikinya serta seberapa jauh Provinsi tersebut dapat merealisasikan potensi dari faktor-faktor yang dimilikinya tersebut.

1. Peringkat Daya Saing Provinsi di Indonesia

Potret daya saing provinsi di Indonesia secara keseluruhan merupakan representasi dari kinerja indikator-indikator pembentuknya, semakin baik kinerja indikator-indikator tersebut, maka semakin tinggi pula daya saing suatu Provinsi, sebaliknya apabila kinerja indikator-indikator tersebut rendah, maka semakin rendah pula Daya Saing Provinsi tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, indikator pembentuk Daya Saing Daerah dalam penelitian ini adalah indikator *output* yang terdiri dari produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita, tingkat kesempatan kerja, dan rata-rata pengeluaran konsumsi per kapita.

Selanjutnya, peringkat Daya Saing Provinsi di Indonesia secara keseluruhan tahun 2010 hingga 2016 ditunjukkan oleh

Tabel 1. Berdasarkan hasil perhitungan skor Daya Saing Daerah secara keseluruhan, Provinsi yang menempati sepuluh peringkat teratas didominasi oleh Provinsi yang memiliki basis ekonomi yang bersumber pada kekayaan sumber daya alam dan/atau yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis sektor industri dan sektor jasa.

Daerah-daerah ini rata-rata termasuk ke dalam daerah “*resources based* atau *manufacturing industry*”. Hal ini menandakan bahwa suatu Provinsi di Indonesia akan memiliki daya saing yang tinggi, apabila didukung oleh keunggulan dari sisi kekayaan sumber daya alam atau aktivitas ekonomi berbasis industri atau jasa relatif dibandingkan dengan Provinsi lainnya.

Sebagaimana ditunjukkan oleh Tabel 1, Provinsi DKI Jakarta merupakan Provinsi dengan peringkat daya saing tertinggi selama kurun waktu 2010 hingga 2016. Sebagai ibu kota negara, Provinsi DKI Jakarta seringkali menjadi cermin

kemajuan pembangunan Negara Indonesia.

Tabel 1. Peringkat Daya Saing Provinsi di Indonesia, 2010-2016

Provinsi	2010		2012		2014		2016	
	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor	Peringkat	Skor
Aceh	27	-0,3775	33	-0,6972	32	-0,7854	33	-0,7619
Sumatera Barat	22	-0,2385	23	-0,2817	24	-0,2835	27	-0,2661
Sumatera Barat	20	-0,1804	20	-0,2823	22	-0,2754	18	-0,1465
Riau	5	0,7883	4	1,3009	6	0,9527	8	0,5769
Jambi	12	-0,0122	9	0,1676	16	-0,0615	10	0,0553
Sumatera Selatan	21	-0,2323	19	-0,1993	18	-0,1133	19	-0,1399
Bengkulu	14	-0,1733	15	-0,2046	14	-0,1521	13	-0,1406
Lampung	24	-0,3370	24	-0,3808	23	-0,3295	26	-0,3420
Bangka Belitung	7	0,3035	6	0,3823	8	0,2559	4	0,4967
Kepulauan Riau	3	0,9361	2	1,1335	3	1,0574	3	0,9619
DKI Jakarta	1	1,9839	1	1,9494	1	2,3461	1	2,8377
Jawa Barat	31	-0,5890	32	-0,6150	31	-0,5520	32	-0,6386
Jawa Tengah	28	-0,4410	28	-0,4822	28	-0,4681	28	-0,4064
D I Yogyakarta	11	-0,1088	11	-0,0581	11	-0,0652	6	0,1076
Jawa Timur	15	-0,0884	18	-0,1740	17	-0,0977	14	-0,0456
Banten	32	-0,5547	30	-0,5451	29	-0,4177	29	-0,3939
Bali	4	0,3578	5	0,4889	4	0,5702	5	0,4308
N T B	24	-0,3583	29	-0,5634	30	-0,5881	25	-0,4182
N T T	26	-0,4496	25	-0,4843	26	-0,4901	30	-0,6047
Kalimantan Barat	13	-0,1314	13	-0,0876	12	-0,0882	20	-0,2282
Kalimantan Tengah	9	0,1107	8	0,1927	7	0,2435	11	0,0128
Kalimantan Selatan	8	0,1022	12	-0,0270	9	0,0980	16	-0,1624
Kalimantan Timur	2	1,9230	3	1,6945	2	1,5393	2	1,0644
Sulawesi Utara	30	-0,4595	27	-0,4104	27	-0,3860	24	-0,2666
Sulawesi Tengah	16	-0,1526	14	-0,1285	13	-0,0791	12	-0,0416
Sulawesi Selatan	29	-0,4479	26	-0,3515	21	-0,2355	21	-0,1374
Sulawesi Tenggara	18	-0,1637	16	-0,1733	19	-0,2533	9	-0,0341
Gorontalo	23	-0,3551	21	-0,3458	20	-0,3145	17	-0,2022
Sulawesi Barat	17	-0,2026	17	-0,2531	15	-0,2010	23	-0,3679
Maluku	33	-0,9219	31	-0,6761	33	-0,9789	31	-0,7264
Maluku Utara	19	-0,2345	22	-0,3644	25	-0,3941	22	-0,3460
Papua Barat	10	0,3425	7	0,3893	5	0,4832	15	0,0595
Papua	6	0,3623	10	0,0869	10	0,0640	7	0,2133

Sumber: Hasil hitung penulis, 2017

Sebagai representasi dari keberhasilan pembangunan bangsa, pencapaian hasil pembangunan di DKI Jakarta menjadi referensi bagi pembangunan di daerah lain. Tingginya daya saing DKI Jakarta ini didorong oleh kinerja Indikator Perekonomian Daerah yang relatif baik dibandingkan dengan daerah Provinsi lainnya. Faktor utama pembentuk Daya Saing Daerah Provinsi DKI Jakarta adalah produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita dan pengeluaran

konsumsi per kapita merupakan tertinggi di Indonesia, sehingga menempatkan Provinsi DKI Jakarta sebagai daerah yang memiliki posisi Daya Saing tertinggi.

Berikutnya, untuk wilayah Kalimantan, Provinsi yang termasuk sepuluh besar adalah Kalimantan Timur, yang menduduki peringkat ke-2, disusul Kalimantan Tengah dan Kalimantan Selatan pada peringkat ke-9 dan ke-10. Faktor utama pembentuk Daya Saing Daerah di tiga Provinsi ini yaitu produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita dan pengeluaran konsumsi per kapita.

Sementara dari wilayah Sumatera, Provinsi Kepulauan Riau, Provinsi Riau dan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan Provinsi yang berada pada posisi sepuluh teratas Daya Saing Daerah di Indonesia. Provinsi Kepulauan Riau sepanjang tahun 2010 hingga 2016 berada pada peringkat ke-3, disusul Provinsi Riau pada posisi ke-4, dan Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung diperingkat ke-4 dan ke-

5. Faktor utama pembentuk Daya Saing Daerah ketiga Provinsi ini didominasi oleh indikator produktivitas tenaga kerja, PDRB per kapita dan pengeluaran konsumsi per kapita penduduk.

Sedangkan Provinsi-Provinsi di wilayah timur Indonesia memiliki posisi daya saing yang beragam selama kurun waktu 2010 hingga 2016. Provinsi Bali, Papua Barat dan Papua merupakan Daerah-Daerah yang tingkat daya saingnya berada pada posisi sepuluh besar teratas selama periode penelitian. Pada tahun 2016 Provinsi Bali berada pada peringkat ke-6, disusul Papua dan Papua Barat pada posisi ke-7 dan ke-9. Sebagai Provinsi tujuan utama wisatawan dunia, perekonomian Bali lebih banyak didukung oleh industri jasa pariwisata, sementara Provinsi Papua Barat dan Papua perekonomiannya ditopang oleh sumber daya alam yang dimiliki berupa pertambangan.

Sementara itu, posisi Daya Saing di wilayah Pulau Sulawesi menempati posisi

daya saing daerah yang beragam. Provinsi Sulawesi Selatan sebagai Provinsi terbesar di Sulawesi menempati peringkat ke-19 pada tahun 2016 turun satu tingkat dibandingkan pada tahun sebelumnya. Sedang Provinsi-Provinsi lainnya menduduki peringkat ke-12 dan ke-13 masing-masing untuk Provinsi Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Tengah. Sementara itu, tiga Provinsi yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Barat dan Gorontalo menempati peringkat sepuluh besar terendah. Sulawesi Barat yang pada tahun 2015 berada pada peringkat ke-17 turun delapan tingkat pada tahun 2016 yaitu pada peringkat ke-25. Sementara Provinsi Sulawesi Utara yang pada tahun 2015 berada di peringkat ke-31 dari 33 Provinsi, pada tahun 2016 meningkat ke peringkat ke-23 di tahun 2016. Demikian juga Provinsi Gorontalo mengalami peningkatan Daya Saing Daerah, yakni pada tahun 2016 di posisi ke-20 dari posisi ke-25 pada tahun sebelumnya.

Selanjutnya, Provinsi-Provinsi lain yang berada pada sepuluh besar terendah pada pemetaan Daya Saing Daerah selama studi ini ditempati oleh Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Lampung, Aceh, Jawa Tengah, Banten dan Jawa Barat. Faktor utama rendahnya Daya Saing Daerah-daerah tersebut terdapat pada indikator produktivitas tenaga kerja, pendapatan per kapita, dan tingkat kesempatan kerja.

Berdasarkan pemetaan peringkat Daya Saing Daerah Provinsi di Indonesia dalam kurun waktu 2010 hingga 2016 menunjukkan bahwa Daerah-Daerah yang menempati posisi sepuluh besar teratas didominasi oleh daerah-daerah yang kaya akan sumber daya alam, seperti Provinsi: Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, Riau, Kepulauan Bangka Belitung, Papua dan Papua Barat, sementara Daerah lainnya yang termasuk sepuluh besar peringkat Daya Saing Daerah Provinsi di Indonesia dengan basis ekonomi pada sektor industri

dan jasa, adalah: Provinsi DKI Jakarta, Bali dan D.I. Yogyakarta.

2. Hasil Estimasi

Estimasi pengaruh faktor pendorong daya saing provinsi pada Tabel 2 menunjukkan bahwa variabel bebas: HEALTH, EDU, INFRA dan INVEST berpengaruh positif dan signifikan secara statistik, kecuali variabel INST.

Tabel 2. Hasil Estimasi Pengaruh Faktor Pendorong Daya Saing Provinsi di Indonesia, 2010 – 2016

Independent Variable	Dependent Variable: Skor Daya Saing Provinsi (RC)		
	Coefficients	t-statistic	Probability
(Constant)	-7,019	-6,868	,000
HEALTH	,050*	2,973	,000
EDU	,022*	6,146	,000
INFRA	,181**	2,936	,004
INST	,008	1,396	,164
INVEST	,082*	3,605	,000

*) signifikan pada $\alpha = 1\%$, **) signifikan pada $\alpha = 5\%$, $R^2 = ,599$

Hasil estimasi dari variabel-variabel bebas tersebut adalah sebagai berikut: infrastruktur mempunyai nilai elastisitas yang terbesar yaitu sebesar 0,181 berikutnya investasi sebesar 0,082. Sementara nilai elastisitas mutu sumber daya manusia yang terdiri dari kesehatan dan pendidikan masing-masing sebesar 0,050 dan 0,022. Sedangkan faktor

kelembagaantidak berpengaruh signifikan terhadap daya saing daerah di Indonesia.

Model dari persamaan pengaruh faktor pendorong daya saing daerah mempunyai nilai Adjusted R-squared (koefisien determinan) sebesar 0,60 yang berarti model mampu menjelaskan variasi perubahan skor daya saing sebesar 60 persen. Sedangkan pada masing-masing variabel bebas yang signifikan dapat diinterpretasikan sebagai berikut:

Variabel kesehatan dengan tingkat elastisitas 0,05 artinya setiap kenaikan 1 satuan Angka Harapan Hidup akan meningkatkan Skor Daya Saing Daerah sebesar 0,05 persen, *ceteris paribus*. Selanjutnya, variabel pendidikan dengan nilai elastisitas 0,02 artinya setiap kenaikan 1 persen jumlah pekerja terdidik akan meningkatkan Skor Daya Saing Provinsi sebesar 0,02 persen, *ceteris paribus*. Sementara variabel infrastruktur dengan tingkat elastisitas 0,18 artinya setiap kenaikan konsumsi listrik per kapita sebesar 1 persen akan

meningkatkan Skor Daya Saing Provinsi sebesar 0,18 persen, *ceteris paribus*. Berikutnya, variabel investasi dengan tingkat elastisitas sebesar 0,08 artinya setiap kenaikan investasi sebesar 1 persen akan meningkatkan Skor Daya Saing Provinsi sebesar 0,08 persen, *ceteris paribus*. Terakhir, faktor kelembagaan yang direpresentasikan dengan kondisi demokrasi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap Daya Saing Provinsi di Indonesia.

3. Pembahasan

Hasil studi menunjukkan faktor kesehatan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap daya saing daerah di Indonesia. Hasil ini sejalan dengan rumusan *The 2006 Community Strategic Guidelines on Cohesion (Official Journal of the European Union, 2006)* yang menggaris bawahi bahwa tenaga kerja yang sehat merupakan faktor kunci dalam meningkatkan partisipasi pasar tenaga kerja, produktivitas dan daya saing di tingkat nasional dan regional. Umumnya,

sebuah negara atau daerah yang penduduknya memiliki tingkat kesehatan yang baik akan berdampak pada lingkungan kerja, produktivitas yang lebih tinggi, dan biaya kesehatan dan sosial yang lebih rendah. Kemudian, Bloom dan Canning (2008) mengingatkan bahwa tingkat kesehatan penduduk yang tinggi dapat berjalan beriringan dengan tingkat pendapatan yang tinggi. Pendapatan yang lebih tinggi mempromosikan kesehatan yang lebih baik melalui peningkatan gizi, akses air bersih dan sanitasi yang lebih baik, dan peningkatan kemampuan untuk membeli perawatan kesehatan yang lebih berkualitas dan lebih baik.

Selanjutnya, hasil studi menunjukkan bahwa faktor pendidikan merupakan salah satu faktor yang memengaruhi tinggi rendahnya daya saing suatu daerah. Semakin bagus kualitas pendidikan tenaga kerja akan semakin tinggi produktivitas daerah tersebut. Tenaga kerja yang lebih terdidik/terampil membuat lebih mudah bagi perusahaan untuk mengadopsi dan

menerapkan teknologi baru. Temuan studi ini mendukung pandangan Drucker (2011) yang menyatakan bahwa telah terjadi pergeseran yang signifikan atas faktor produksi. Semula, faktor produksi yang memegang peranan penting adalah modal, tenaga kerja dan tanah, kini tenaga kerja saja tidak cukup. Tenaga kerja dengan *knowledge* (ilmu pengetahuan) atau lazim disebut *human capital* menjadi faktor produksi yang mempunyai peranan vital. Fenomena ini oleh Drucker dilabeli sebagai *knowledge based economy*. Pertumbuhan ekonomi kini tidak bisa lagi bertumpu pada faktor produksi berupa modal uang dan tanah, akan tetapi telah terjadi pergeseran dimana *human capital* menjadi faktor produksi utama untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan senjata bagi sebuah negara untuk memenangkan kompetisi global (*competitive advantage of nation*).

Demikian juga, Crouchet *al.* (1999) memberikan bukti bahwa pekerja berpendidikan tinggi lebih cenderung

bekerja di sektor yang terpapar persaingan internasional. Sementara Abramovitz (1986) berpendapat bahwa pendidikan dan pelatihan kejuruan merupakan bagian dari serangkaian faktor utama yang menopang perekonomian masyarakat.

Berikut, hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa ketersediaan infrastruktur berpengaruh signifikan dan positif terhadap daya saing daerah di Indonesia. Ketersediaan infrastruktur, seperti jalan, pelabuhan, sistem penyediaan tenaga listrik, irigasi, sistem penyediaan air bersih, sanitasi, dan sebagainya yang merupakan *social overhead capital*, memiliki keterkaitan yang sangat kuat dengan tingkat perkembangan wilayah, antara lain dicirikan oleh laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dapat dilihat dari kenyataan bahwa daerah yang mempunyai kelengkapan sistem infrastruktur yang lebih baik, mempunyai tingkat laju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik pula,

dibandingkan dengan daerah yang mempunyai kelengkapan infrastruktur yang terbatas. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penyediaan infrastruktur merupakan faktor utama dalam mendukung pembangunan wilayah dan dengan demikian daya saing Daerah (Kirmanto, 2005).

Senada dengan hasil penelitian ini, Aschauer (1989) berpandangan bahwa ketersediaan pelayanan infrastruktur merupakan faktor produksi penting. Aschauer juga menemukan fakta bahwa menurunnya produktivitas, dapat disebabkan oleh memburuknya ketersediaan pelayanan infrastruktur. Selanjutnya, penelitian ini juga mendukung temuan Prasetyo (2009) bahwa infrastruktur yang didekati dengan energi listrik terjual berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Dengan kata lain, ketersediaan infrastruktur energi listrik memiliki peranan penting dalam

perekonomian baik untuk keperluan rumah tangga maupun industri.

Lebih jauh, ketersediaan infrastruktur juga menarik perhatian pemerintah. Selama 3 tahun pemerintahan Joko Widodo dan Jusuf Kalla, pembangunan infrastruktur menjadi prioritas. Bahkan dapat dikatakan istilah “infrastruktur” sendiri telah melekat pada citra diri pemerintahan saat ini. Dalam berbagai kesempatan, Presiden menyampaikan betapa pentingnya infrastruktur bagi kemajuan suatu bangsa. “Tanpa infrastruktur, jangan mimpi negara ini bisa bersaing,” ungkap Presiden berulang-ulang di berbagai kesempatan.

Sementara itu, faktor kelembagaan yang didekati dengan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) tidak berpengaruh signifikan terhadap Daya Saing Daerah di Indonesia. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi demokrasi di Indonesia yang mencerminkan dinamika perkembangan demokrasi di Indonesia belum efektif sebagai faktor pendorong perekonomian di

daerah. Hasil ini tidak sesuai dengan pandangan Rowen (1990), Sen (2001), dan Barro (1996) yang menyatakan bahwa terdapat hubungan positif antara pembangunan ekonomi dan kebebasan (demokrasi). Demokrasi dapat merangsang pertumbuhan ekonomi, karena demokrasi mampu memotivasi orang untuk bekerja dan berinvestasi yang akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Sebaliknya, hasil penelitian ini lebih mendukung pandangan Lipset (1959) dan Bhagwati (1995) yang menyatakan bahwa negara-negara dengan sistem demokrasi akan rentan terhadap konflik sosial dan ketidakpastian yang berdampak negatif terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi. Lebih jauh, kemajuan ekonomi seharusnya berjalan paralel dengan kemapanan sistem demokrasi. Namun, pengalaman di Indonesia dalam membangun sistem politik demokrasi justru melahirkan fenomena ganjil. Sistem demokrasi yang berhasil dibangun selama hampir dua dasawarsa ternyata belum

membawa dampak signifikan pada kemajuan ekonomi (Alhumami, 2010).

Seperti diketahui, sistem politik Indonesia memang merujuk pada sistem demokrasi modern. Semua kelembagaan politik yang menjadi pilar utama demokrasi telah tersedia dan terbangun dengan baik, bahkan presiden dan anggota parlemen pun dipilih langsung oleh rakyat. Namun, pemerintahan demokratis tak disokong oleh institusi publik-organisasi yang bersih (birokrasi, aparat kepolisian, institusi peradilan). Lembaga parlemen yang sangat vital dalam proses perumusan kebijakan publik justru menjadi salah satu episentrum praktik korupsi akut dan sistemik sehingga memberi andil pada sulitnya membangun tata kelola pemerintahan yang baik. Lebih jauh, parlemen dihuni politisi korup yang hanya berorientasi mengumpulkan modal untuk membiayai kegiatan politik dan memperkaya diri. Diyakini sepenuhnya, praktik korupsi berskala gigantis yang merajalela di lembaga-lembaga politik dan

pemerintahan menjadi faktor negatif dan diskredit bagi ikhtiar akselerasi pertumbuhan ekonomi dan dengan demikian daya saing ekonomi.

Setali dua uang dengan hal di atas, temuan studi ini juga menunjukkan bahwa faktor kelembagaan yang direpresentasikan oleh perkembangan kondisi demokrasi di Indonesia tidak berpengaruh signifikan terhadap tinggi rendahnya daya saing provinsi di Indonesia. Fakta ini sesuai dengan pandangan Alhumami (2010) yang menyatakan bahwa sistem demokrasi di Indonesia tidak menyumbang pada pertumbuhan ekonomi karena terhalang oleh praktik korupsi berjenjang dan berkelanjutan sehingga tak mampu menciptakan iklim kondusif bagi aktivitas bisnis, investasi, serta pertukaran dan lalu lintas modal domestik maupun asing.

Selanjutnya, hasil studi menunjukkan bahwa investasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Daya Saing Daerah. Hal ini berarti setiap tambahan investasi

akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi selanjutnya akan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas sehingga memberi peluang kepada penduduk untuk memperoleh pendapatan. Pendapatan tersebut kemudian dibelanjakan oleh masyarakat untuk mempertahankan standar dan kualitas hidup yang mencerminkan tingkat kesejahteraan. Hasil ini sejalan dengan studi Delgado *et al.* (2012) yang menunjukkan bahwa aliran investasi, khususnya investasi asing, ke suatu daerah akan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah tersebut yang pada gilirannya meningkatkan kesempatan kerja bagi penduduknya dan dengan demikian meningkatkan daya saing ekonomi.

KESIMPULAN

Daerah yang memiliki daya saing yang tinggi secara umum didominasi oleh Provinsi yang memiliki basis ekonomi yang bersumber pada kekayaan sumber daya alam dan/atau daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi berbasis

sektor industri dan sektor jasa. Sedangkan Provinsi yang memiliki posisi daya saing relatif rendah umumnya merupakan daerah dengan basis ekonomi yang bersandar pada sektor primer (khususnya pertanian).

Secara keseluruhan, temuan studi menunjukkan bahwa faktor penentu Daya Saing Provinsi di Indonesia selama pengamatan 2010 hingga 2016 merupakan faktor persyaratan dasar (*basic requirements*) dalam pembangunan ekonomi. Di samping investasi, aspek kesehatan, pendidikan, dan ketersediaan infrastruktur merupakan faktor penting untuk meningkatkan daya saing daerah sebagai modal utama pembangunan ekonomi dalam upaya menghadapi persaingan global saat ini. Selanjutnya, faktor kelembagaan yang direpresentasikan oleh kondisi perkembangan demokrasi di daerah belum efektif berpengaruh positif terhadap daya saing provinsi di Indonesia.

REFERENSI

- Abramovitz, M. 1986. Catching up, forging ahead, and falling behind. *Journal of Economic History*. Cambridge: Cambridge University Press, Vol. 46, p. 385-406.
- Alhumami, A. 2010. Demokrasi dan Pertumbuhan Ekonomi. Jakarta: *Okezone*, 8 Oktober 2010.
- Annoni, P., Dijkstra, L dan Gargano, N. 2017. *The EU Regional Competitiveness Index 2016*. European Union Regional Policy Working Paper No. 02/2017. Brussels, Belgium: European Commission.
- Audretsch, D. dan Keilbach, M. 2004. Entrepreneurship and Regional Growth: An Evolutionary Interpretation. *Journal of Evolutionary Economics*, 14 (5), pp.605-616.
- Aschauer, D.A. 1989. Is Public Expenditure Productive. *Journal of Monetary Economics*, Volume 23. pp.177-200.
- Badan Koordinasi Penanaman Modal. 2016. Perkembangan Realisasi Investasi PMDN dan PMA berdasarkan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) menurut Lokasi, 2016. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2017. PDRB Provinsi-Provinsi di Indonesia Menurut Lapangan Usaha, 2010-2016. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2017. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) 2016. Jakarta

- Badan Pusat Statistik. 2017. Laporan Perekonomian Indonesia 2017. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2017. Statistik Indonesia 2017. Jakarta
- Badan Pusat Statistik. 2017. Publikasi Keadaan Angkatan Kerja Nasional 2016. Jakarta
- Bank Indonesia. 2017. Laporan Perekonomian Indonesia 2016. Jakarta
- Barro, Robert J. 1996. Democracy And Growth. *Journal of Economic Growth*, March 1996, Volume 1, Issue 1, pp 1–27.
- Bhagwati, Jagdish. 1995. Democracy and Development: New Thinking on an Old Question. *Indian Economic Review*, 1995, vol. 30, issue 1, pp 1-18
- Bloom, D.E dan Canning, D. 2008. *Population Health and Economic Growth*. The International Bank for Reconstruction and Development / The World Bank On behalf of the Commission on Growth and Development. Working Paper No. 24.
- Bristow, G. 2005. Everyone's A 'Winner': Problematizing The Discourse of Regional Competitiveness. *Journal of Economic Geography*, 5 (3), pp. 285-304.
- Camagni, R. 2002. "On The Concept of Territorial Competitiveness: Sound or Misleading?" *Urban Studies*, 39, pp. 2395-2411.
- Courlet, C. dan Soulage, B. 1995. Industrial dynamics and territorial space. *Entrepreneurship & Regional Development*, 7, pp. 285-307.
- Crouch, C., Finegold, D., dan Sako, M. 1999. *Are skills the answer? The political economy of skill creation in advanced industrial countries*. Oxford: Oxford University Press, 1999.
- Delgado, M., Christian K., Porter, M.E., dan Stern, S. 2012. The Determinants of National Competitiveness. *National Bureau of Economic Research*. Working Paper No. 18249
- Dijkstra, L., Annoni, P., dan Kozovska, K. 2011. *A New Regional Competitiveness Index: Theory, Methods and Findings* (European Union Regional Policy Working Paper No. 02/2011). Brussels, Belgium: European Commission.
- Drucker, P.F. 2011. *Post Capitalist Society*. New York: Roudledge.
- Gardiner, B., Martin, R., dan Tyler, P. 2004. Competitiveness, Productivity and Economic Growth Across the European Regions. *Regional Studies*, 38: 1045-1067.
- Garofoli, G. 2002. Local Development in Europe: Theoretical Models and International Comparisons. *European Urban and Regional Studies*, 9, pp. 225-239.
- Huggins, R. 2003. Creating a UK Competitiveness Index: Regional and Local Benchmarking. *Regional Studies*, 37(1), pp. 89-96.
- Huggins, R., Izushi, H., dan Thompson, P. 2013. Regional Competitiveness: Theories and Methodologies for Empirical Analysis. *JCC: The Business and Economics Research Journal*. Volume 6, Issue 2, 2013 .55-172.

- Huggins, R, Izushi, H., Prokop, D. dan Thompson, P. 2014. Regional Competitiveness, Economic Growth and Stages of Development. *Zbornik Radova Ekonomskog Fakultet au Rijeci*, vol. 32, (2), pp. 255-283.
- Kirmanto, J. 2005. Prospek Pembangunan Infrastruktur. Sekolah Tinggi Teknik Sapta Taruna, Jakarta.
- Kitson, M., Martin, R. dan Tyler, P. 2004. Regional competitiveness: An elusive yet key concept? *Regional Studies*, 38, pp. 991-999.
- Krugman, P. 1994. Competitiveness: A Dangerous Obsession. *Foreign Affairs*, 73(2), 28-44. [dx.doi.org/10.2307/20045917](https://doi.org/10.2307/20045917).
- Krugman, P. 1996. Making sense of the competitiveness debate. *Oxford Review of Economic Policy* 12(3), pp. 17-25.
- Lawson, C. dan Lorenz, E. 1999. Collective learning, tacit knowledge and regional innovative capacity. *Regional Studies*, 33, pp. 305-317.
- Lengyel, I dan Rechnitzer, J. 2013. Drivers of Regional Competitiveness in the Central European Countries. *Transit Stud Rev* (2013) 20:421-435 DOI 10.1007/s11300-013-0294-2.
- Lipset, Seymour. M. 1959. Some Social Requisites of Democracy: Economic Development and Political Legitimacy. *American Political Science Review*, 53 (March 1959), pp. 69 -105.
- Maillat, D. 1998. Interactions between urban systems and localized productive systems: An approach to endogenous regional development in terms of innovative milieu. *European Planning Studies*, 6, pp. 117-129.
- Meyer-Stamer, J. 2008. Systematic Competitiveness and Local Economic Development. dalam Shamin Bodhanya (ed.) *Large Scale Systemic Change: Theories, Modelling and Practices*.
- Official Journal of the European Union. 2006. Council Decision of 6 October 2006 on Community strategic guidelines on cohesion. (2006/702/EC). http://ec.europa.eu/regional_policy/sources/docoffic/2007/osc/1_2912006_1021en00110032.pdf.
- Perusahaan Listrik Negara (PLN). 2017. Statistik PLN 2016.
- Porter, M. E. 1990. *The Competitive Advantage of Nations*, Harvard Business Review.
- Porter, M. E. 2007. *Competitiveness: implications for Central Europe and the Czech Republic*. Paper presented in Prague, 22 October.
- Prasetyo, R.B., dan Firdaus, M. 2009. Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Wilayah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan*, Vol. 2 (2):222-236
- Rowen. 1990. The Tide Underneath the Third Wave, p. 55.
- Sen, Amartya. 2001. Democracy as a Universal Value, dalam Larry Diamond and Marc F. Plattner (eds), *The Global Divergence of Democracies*. Baltimore, Md: John Hopkins University Press.

Tan, Khee G., Merdikawati, N., Amri, M., dan Tang Kong Yam. 2016. *Analisis Daya Saing Provinsi dan Wilayah: Menjaga Momentum Pertumbuhan Indonesia. Edisi 2014*. Singapore: World Scientific Publishing Co. Pte.Ltd.

World Economic Forum. 2016. *Global Competitiveness Report, 2016-2017*, Geneva, Switzerland: World Economic Forum.